

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang hampir setiap tahunnya negara-negara di dunia menaruh perhatian yang besar pada strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Setiap akhir tahun masing-masing negara membuat statistik untuk menghitung pertumbuhan ekonominya dan membuat perbaikan bila strategi yang telah ditempuh untuk mempercepat pertumbuhan belum memuaskan. Terlepas dari strategi yang digunakan, secara umum berbagai studi maupun teori pertumbuhan ekonomi menyimpulkan paling tidak ada tiga faktor penentu yang sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia (tenaga kerja, pendidikan, disiplin, dan motivasi), sumber daya modal, dan kemajuan teknologi (ilmu pengetahuan, teknik, manajemen, dan ketrampilan).

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pendidikan dalam artian luas, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Output pendidikan pada tataran ideal diharapkan mempunyai tiga unsur utama yaitu keahlian, kepribadian, dan pengetahuan, sehingga selama mengikuti pendidikan dapat membentuk nilai-nilai moral dan karakter seseorang untuk hidup mandiri, memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih luas dan terutama memiliki keahlian yang siap digunakan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Walaupun dalam kenyataannya output pendidikan yang ideal itu sulit diperoleh, karena pada tataran strategi dan implementasi pendidikan sendiri menghadapi masalah yang kompleks.

Terlepas dari sulitnya memperoleh output ideal tersebut dapat dipercaya bahwa pendidikan formal mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena merupakan investasi untuk meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia, memperkuat modal fisik dan kemampuan menyesuaikan pengetahuan teknik yang mendukung penggunaan teknologi-teknologi terbaru.

Oleh karena dibutuhkan reformasi pendidikan untuk memberikan bekal kepada tenaga kerja agar mempunyai kemampuan adaptasi, memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar, mengembangkan sikap yang mudah menerima informasi sehingga pada akhirnya akan mempunyai kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bangsa (World Development Report, 1996). Pendidikan harus dipandang sebagai barang publik yang mempunyai eksternalitas positif sehingga dapat menaikkan produktifitas dan bukan dipandang sebagai barang konsumsi. Sehingga wajar dalam konstitusi yang telah diperbaharui dinyatakan adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan 20% dari anggaran belanjanya untuk sektor pendidikan.

Bila dibandingkan dengan negara-negara maju (*Organization for Economic Co-Operation and Development*, (OECD), maka di negara-negara yang sedang berkembang (non OECD), perhatian terhadap pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia relatif kurang, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain (1) rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana pengembangan sumberdaya manusia, (2) peralatan dan fasilitas pendidikan, serta sarana pendukung lainnya masih relatif terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya, (3) masih terbatasnya tenaga-tenaga ahli pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, (4) bersifat jangka panjang,

karena hasilnya baru bisa dilihat setelah satu atau dua dasawarsa kemudian, sehingga cenderung diabaikan, dan (5) terbatasnya dana yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

Melihat fenomena pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan catatan peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang terus positif seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1. Hal ini akan berimplikasi pada terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja baik dari segi kuantitas terlebih dari segi kualitas yakni permintaan tenaga kerja terdidik. Jika dari sisi kuantitas maka dapat dipastikan tidak akan menimbulkan masalah, karena relatif besarnya jumlah angkatan kerja yang dimiliki, akan tetapi yang menjadi masalah yang krusial adalah bagaimana memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik yang akan terus meningkat seiring dengan meluasnya sektor-sektor kegiatan ekonomi terutama pada sektor industri dan jasa-jasa di Sumatera Utara, hal ini terjadi karena melihat komposisi angkatan kerja di Sumatera Utara berdasarkan latar belakang pendidikan yang tersaji pada tabel 1.2.

**Tabel 1.1. Tingkat PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Riil Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000**

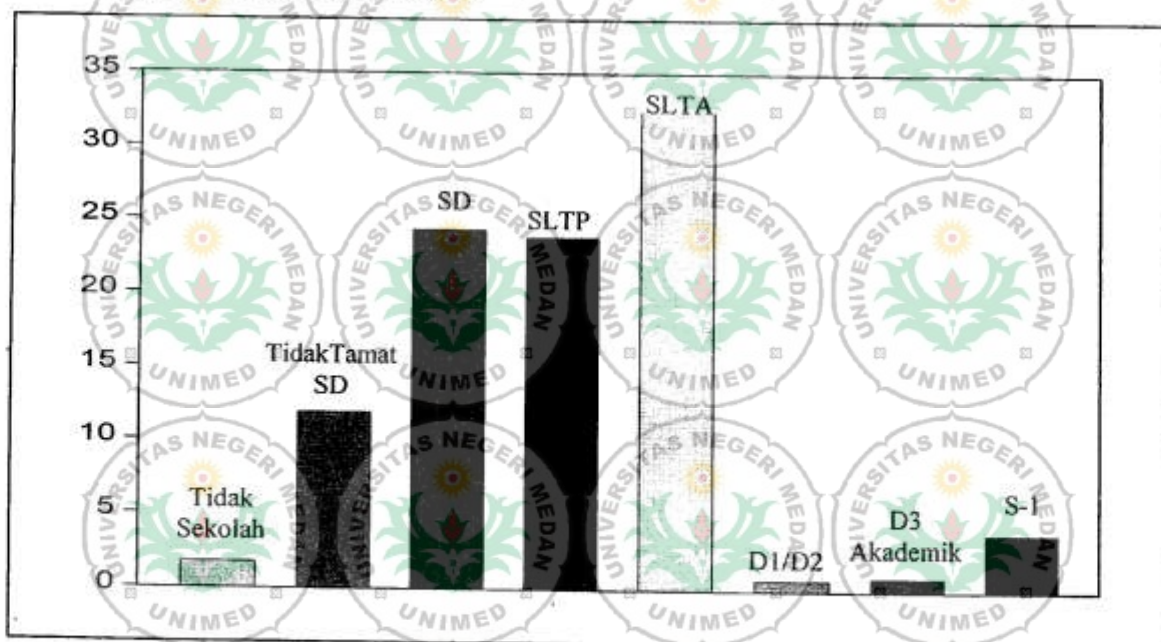
Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tingkat PDRB (milyar rupiah)	71.908	75.189	78.805	82.328	87.897	93.330
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,83	4,56	4,81	5,74	5,58	6,18

Sumber: BPS Sumatera Utara, (2006)

Dari Tabel 1.2. tampak bahwa persentase angkatan kerja pada usia yang berusia 15 tahun ke atas pada data tahun 2006 didominasi berpendidikan SLTA sebesar 32,90 persen, kemudian berpendidikan SD sebesar 24,31persen, dan SLTP 23,80 persen. Sedangkan angkatan kerja yang berlatar pendidikan tinggi atau serendah-rendahnya

dengan ijazah D-1 hanya sekitar 5-6 persen dari seluruh angkatan kerja di Sumatera Utara, selengkapnya berpendidikan D1/D2 sebesar 0,70 persen, Akademik/D3 sebesar 0,89 persen dan S-1 sebesar 3,81, sedangkan sisanya yang tidak tamat SD dan tidak sekolah sebesar 11,86 persen dan 1,72.

**Tabel 1.2. Angkatan Kerja Sumatera Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2006**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2006

Data ini menunjukkan masih relatif rendahnya angkatan kerja di Sumatera Utara yang berlatar pendidikan tinggi akibat beberapa alasan tertentu misalnya, mengingat besarnya biaya pendidikan dan alasan untuk segera memperoleh pendapatan dengan mencari pekerjaan dengan dasar pendidikan SLTA. Hal ini nantinya akan menimbulkan masalah karena dengan semakin pesatnya perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi akan menuntut pula ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar pendidikan tinggi. Contohnya dapat terlihat dengan standar latar belakang pendidikan

yang sering dipakai oleh sektor industri dan jasa saat ini yang umumnya membuat kualifikasi rekrutmen calon tenaga kerja serendah-rendahnya berpendidikan D3, sehingga dengan demikian banyak angkatan kerja yang langsung tersisih dan tidak dapat bersaing di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan kerja karena tidak mampu memenuhi syarat kualifikasi dasar.

Oleh karena itu sudah saatnya diwujudkan upaya memperluas investasi di sektor pendidikan karena pendidikan adalah upaya nyata untuk meningkatkan produktifitas seseorang, sehingga ke depan pengambil kebijakan tidak hanya terfokus pada kebijakan ekonomi jangka pendek berupa kebijakan perdagangan, fiskal dan moneter untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi, akan tetapi harus lebih peduli pada pembahasan yang lebih mendasar, yaitu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang seperti masalah kualitas sumber daya manusia atau pendidikan. Karena fakta masih rendahnya sumbangan produktifitas dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya, sebelum krisis moneter rata-rata tumbuh sekitar 6-7 persen per tahun, sekitar tiga persen disumbangkan dari pertumbuhan modal fisik, dua persen dari pertumbuhan tenaga kerja dan hanya sekitar satu persen dari faktor produksi total (*Total Factor Product*, TFP) yaitu sumbangan produktivitas yang tidak berasal dari akumulasi modal fisik dan tenaga kerja melainkan dari tingkat kualitas tenaga kerja dan kemampuan teknologi (Umar Juoro, 2003).

Kebijakan nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia misalnya dengan pembangunan infra struktur pendidikan terutama sekolah-sekolah yang menjangkau semua daerah-daerah bahkan yang terpencil sekalipun. Di Propinsi Sumatera utara sendiri dari data jumlah sekolah menunjukkan

pendidikan formal yang dimiliki oleh angkatan kerja di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara melalui penelitian berupa tesis dengan judul **"Dampak Pendidikan Formal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara"**

## **B. Perumusan Masalah**

Berbagai kajian tentang pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa terdapat tiga unsur pokok penentu pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia, modal dan teknologi. Salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Jika difokuskan pada pendidikan formal maka pendidikan dapat di kelompokkan setidaknya menjadi tiga bagian besar yakni pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi, yang masing-masing mempunyai pengaruh atau dampak yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping itu adalah kenyataan bahwa sangat besarnya peran pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan fiskal yakni pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan yang memang masih sangat membutuhkan dana bagi pengembangan yang tidak sedikit.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana dampak latar belakang tingkat pendidikan angkatan kerja Sumatera Utara yang masing-masing dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

2. Bagaimanakah dampak pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui dampak masing-masing tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.
2. Mengetahui dampak tingkat pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara yang dialokasikan ke sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumber kajian bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang dampak struktur angkatan kerja di Sumatera Utara berdasarkan latar belakang terhadap pertumbuhan ekonomi, serta bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional seperti mengenai dampak tingkat pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.